



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas 56);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
dan
BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.	2.102.272.191.827,69
b.	Belanja	Rp.	1.978.071.807.106,53
	Surplus	Rp.	124.200.384.721,16
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp.	114.914.953.488,17
	- Pengeluaran	Rp.	232.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp.	(117.085.046.511,83)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.125.001.581.801,31 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 2.227.273.773.629,00
 2. Realisasi Rp. 2.102.272.191.827,69
Selisih lebih/(kurang) Rp. 125.001.581.801,31
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.257.517.180.810,47 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 2.235.588.987.917,00
 2. Realisasi Rp. 1.978.071.807.106,53
Selisih lebih/(kurang) Rp. 257.517.180.810,47
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (132.515.599.009,16 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (8.315.214.288,00)
 2. Realisasi Rp. 124.200.384.721,16
Selisih lebih/(kurang) Rp. (132.515.599.009,16)
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.125.400.260.799,83 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 240.315.214.288,00
 2. Realisasi Rp. 114.914.953.488,17
Selisih lebih/(kurang) Rp. 125.400.260.799,83
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 232.000.000.000,00
 2. Realisasi Rp. 232.000.000.000,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.125.400.260.799,83 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pembiayaan netto Rp. 8.315.214.288,00

	setelah perubahan	
2.	Realisasi	Rp. (117.085.046.511,83)
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 125.400.260.799,83

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a.	Jumlah asset	Rp. 3.393.414.883.531,03
b.	Jumlah kewajiban	Rp. 354.705.604.564,01
c.	Jumlah ekuitas dana	Rp. 3.038.709.278.967,02

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2024	Rp. 18.315.214.288,17
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 410.777.905.889,41
c.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp. (286.577.521.168,25)
d.	Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. (135.400.000.000,00)
e.	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp. 4.296.565,00
f.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 0,00
g.	Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp. 0,00
h.	Saldo Akhir Kas	Rp. 7.119.895.574,33

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.	Lampiran I	:	Laporan realisasi anggaran;
	Lampiran I.1	:	Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
	Lampiran I.2	:	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
	Lampiran I.3	:	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
Lampiran II	:	Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
Lampiran III	:	Laporan operasional;
Lampiran IV	:	Laporan perubahan ekuitas;
Lampiran V	:	Neraca;
Lampiran VI	:	Laporan arus kas;
Lampiran VII	:	Catatan atas laporan keuangan;
Lampiran VIII	:	Daftar rekapitulasi piutang daerah;
Lampiran IX	:	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
Lampiran X	:	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
Lampiran XI	:	Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
Lampiran XII	:	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran XIII	:	Daftar rekapitulasi aset tetap;
Lampiran XIV	:	Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
Lampiran XV	:	Daftar rekapitulasi aset lainnya;
Lampiran XVI	:	Daftar dana cadangan daerah;
Lampiran XVII	:	Daftar kewajiban jangka pendek;
Lampiran XVIII	:	Daftar kewajiban jangka panjang;
Lampiran XIX	:	Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran XX.1	:	Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah;
Lampiran XX.2	:	Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. lampiran kinerja tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini; dan
- b. ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI SAMBAS,



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPAS
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SAMPAS TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN SEMESTER KEDUA TAHUN 2024

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/KURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	312.334.477.478,00	229.120.841.939,69	83.213.635.538,31	73,36
4.1.01	Pajak Daerah	51.964.431.990,00	49.427.529.725,56	2.536.902.264,44	95,12
4.1.01.06	Pajak Hotel	738.426.620,00	785.129.330,00	(46.702.710,00)	106,32
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.300.000.000,00	5.210.363.548,00	(910.363.548,00)	121,17
4.1.01.08	Pajak Hiburan	200.000.000,00	249.637.730,00	(49.637.730,00)	124,82
4.1.01.09	Pajak Reklame	600.000.000,00	667.572.425,00	(67.572.425,00)	111,26
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	17.300.000.000,00	17.224.483.767,00	75.516.233,00	99,56
4.1.01.11	Pajak Parkir	394.380.000,00	412.180.000,00	(17.800.000,00)	104,51
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	752.395.662,00	771.646.059,56	(19.250.397,56)	102,56
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.455.730.668,00	2.097.289.890,00	(641.559.222,00)	144,07
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.562.216.276,00	6.526.098.364,00	1.036.117.912,00	86,30
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	18.661.282.764,00	15.483.128.612,00	3.178.154.152,00	82,97
4.1.02	Retribusi Daerah	4.124.800.000,00	4.899.915.339,00	(775.115.339,00)	118,79
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.675.300.000,00	1.986.307.000,00	(311.007.000,00)	118,56
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	644.500.000,00	812.713.595,00	(168.213.595,00)	126,10
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.805.000.000,00	2.100.894.744,00	(295.894.744,00)	116,39
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.707.885.391,00	3.707.885.391,00	0,00	100,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.707.885.391,00	3.707.885.391,00	0,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	252.537.360.097,00	171.085.511.484,13	81.451.848.612,87	67,75
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	22.773.921.270,00	261.851.811,00	22.512.069.459,00	1,15
4.1.04.05	Jasa Giro	21.772.336.798,00	1.160.623.032,71	20.611.713.765,29	5,33
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	27.026.870.768,00	256.431.764,60	26.770.439.003,40	0,95
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	279.097.418,00	290.888.118,26	(11.790.700,26)	104,22
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	6.398.907.722,00	2.893.998.580,29	3.504.909.141,71	45,23
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	174.286.226.121,00	166.062.016.445,47	8.224.209.675,53	95,28
4.1	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	312.334.477.478,00	229.120.841.939,69	83.213.635.538,31	73,36
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.913.811.296.151,00	1.872.025.231.888,00	41.786.064.263,00	97,82
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.786.621.140.443,00	1.772.304.383.948,00	14.316.756.495,00	99,20
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.582.960.731.443,00	1.568.644.074.948,00	14.316.656.495,00	99,10
4.2.01.05	Dana Desa	189.754.697.000,00	189.754.697.000,00	0,00	100,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	13.905.712.000,00	13.905.612.000,00	100.000,00	100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.190.155.708,00	99.720.847.940,00	27.469.307.768,00	78,40
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	119.440.155.708,00	92.147.501.590,00	27.292.654.118,00	77,15
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	7.750.000.000,00	7.573.346.350,00	176.653.650,00	97,72
4.2	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.913.811.296.151,00	1.872.025.231.888,00	41.786.064.263,00	97,82

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/KURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.128.000.000,00	1.126.118.000,00	1.882.000,00	99,83
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.128.000.000,00	1.126.118.000,00	1.882.000,00	99,83
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.128.000.000,00	1.126.118.000,00	1.882.000,00	99,83
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.128.000.000,00	1.126.118.000,00	1.882.000,00	99,83
4	JUMLAH PENDAPATAN	2.227.273.773.629,00	2.102.272.191.827,69	125.001.581.801,31	94,39
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	1.533.342.829.012,00	1.390.981.011.773,28	142.361.817.238,72	90,72
5.1.01	Belanja Pegawai	669.134.194.007,00	642.865.726.454,12	26.268.467.552,88	96,07
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	415.985.015.612,00	412.822.254.760,00	3.162.760.852,00	99,24
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	56.602.758.972,00	54.184.033.094,00	2.418.725.878,00	95,73
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	129.228.425.776,00	112.020.873.758,00	17.207.552.018,00	86,68
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.187.221.795,00	23.141.444.831,00	45.776.964,00	99,80
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/MKDH	198.711.062,00	167.926.141,00	30.784.921,00	84,51
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/MKDH	852.000.000,00	807.000.000,00	45.000.000,00	94,72
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	43.080.060.790,00	39.722.193.870,12	3.357.866.919,88	92,21
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	672.895.206.250,00	583.619.065.645,48	89.276.140.604,52	86,73
5.1.02.01	Belanja Barang	125.063.294.781,00	104.018.496.464,00	21.044.798.317,00	83,17
5.1.02.02	Belanja Jasa	139.807.460.147,00	117.410.381.284,00	22.397.078.863,00	83,98
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	79.413.156.888,00	50.117.861.612,00	29.295.295.276,00	63,11
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	84.162.015.218,00	76.992.867.877,00	7.169.147.341,00	91,48
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.105.153.101,00	12.186.835.751,00	918.317.350,00	92,99
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	79.347.978.657,00	79.056.890.514,00	291.088.143,00	99,63
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18.905.927.240,00	16.480.045.330,00	2.425.881.910,00	87,17
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	133.090.220.218,00	127.355.686.813,48	5.734.533.404,52	95,69
5.1.03	Belanja Bunga	10.600.000.000,00	10.573.881.395,68	26.118.604,32	99,75
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	10.600.000.000,00	10.573.881.395,68	26.118.604,32	99,75
5.1.05	Belanja Hibah	179.481.257.940,00	152.778.335.378,00	26.702.922.562,00	85,12
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.297.289.800,00	3.090.622.500,00	2.206.667.300,00	58,34
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	155.408.979.390,00	131.148.500.074,00	24.260.479.316,00	84,39
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	8.516.250.000,00	8.421.299.729,00	94.950.271,00	98,89
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.786.568.750,00	1.786.568.750,00	0,00	100,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	8.472.170.000,00	8.331.344.325,00	140.825.675,00	98,34
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.232.170.815,00	1.144.002.900,00	88.167.915,00	92,84
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.232.170.815,00	1.144.002.900,00	88.167.915,00	92,84
5.1	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.533.342.829.012,00	1.390.981.011.773,28	142.361.817.238,72	90,72

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/KURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA MODAL	400.274.868.196,00	286.839.372.979,25	113.435.495.216,75	71,66
5.2.01	Belanja Modal Tanah	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.674.344.560,00	49.279.078.359,26	5.395.266.200,74	90,13
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	6.012.825.000,00	5.634.150.000,00	378.675.000,00	93,70
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.434.256.450,00	7.744.123.625,00	690.132.825,00	91,82
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	151.976.125,00	66.574.500,00	85.401.625,00	43,81
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	16.726.553.051,00	14.616.389.527,00	2.110.163.524,00	87,38
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.529.400.000,00	1.479.141.000,00	50.259.000,00	96,71
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.465.755.200,00	4.481.362.200,00	984.393.000,00	81,99
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	158.900.000,00	98.294.000,00	60.606.000,00	61,86
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	645.000.000,00	641.222.000,00	3.778.000,00	99,41
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	47.500.000,00	45.560.000,00	1.940.000,00	95,92
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.711.137.243,00	8.690.478.195,00	20.659.048,00	99,76
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.788.041.491,00	5.781.783.312,26	1.006.258.178,74	85,18
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107.951.637.200,00	92.414.418.543,00	15.537.218.657,00	85,61
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	106.105.162.200,00	91.392.913.447,00	14.712.248.753,00	86,13
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.586.475.000,00	881.505.096,00	704.969.904,00	55,56
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	260.000.000,00	140.000.000,00	120.000.000,00	53,85
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	229.077.052.336,00	137.545.363.276,99	91.531.689.059,01	60,04
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	180.526.648.786,00	104.193.866.726,99	76.332.782.059,01	57,72
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	8.561.649.800,00	3.910.274.900,00	4.651.374.900,00	45,67
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.157.750.000,00	2.155.856.000,00	1.894.000,00	99,91
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	37.581.003.750,00	27.043.190.650,00	10.537.813.100,00	71,96
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	250.000.000,00	242.175.000,00	7.825.000,00	96,87
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.221.834.100,00	7.600.512.800,00	621.321.300,00	92,44
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.057.000.000,00	1.497.800.000,00	559.200.000,00	72,81
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.164.834.100,00	6.102.712.800,00	62.121.300,00	98,99
5.2	JUMLAH BELANJA MODAL	400.274.868.196,00	286.839.372.979,25	113.435.495.216,75	71,66
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.068.832.516,00	150.475.000,00	918.357.516,00	14,08
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.068.832.516,00	150.475.000,00	918.357.516,00	14,08
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.068.832.516,00	150.475.000,00	918.357.516,00	14,08
5.3	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	1.068.832.516,00	150.475.000,00	918.357.516,00	14,08
5.4	BELANJA TRANSFER	300.902.458.193,00	300.100.947.354,00	801.510.839,00	99,73
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.471.968.454,00	5.471.968.454,00	0,00	100,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.023.501.850,00	5.023.501.850,00	0,00	100,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	448.466.604,00	448.466.604,00	0,00	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	295.430.489.739,00	294.628.978.900,00	801.510.839,00	99,73

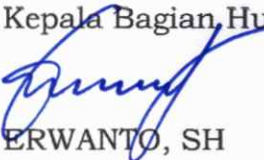
KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/KURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	295.430.489.739,00	294.628.978.900,00	801.510.839,00	99,73
5.4	JUMLAH BELANJA TRANSFER	300.902.458.193,00	300.100.947.354,00	801.510.839,00	99,73
5	JUMLAH BELANJA	2.235.588.987.917,00	1.978.071.807.106,53	257.517.180.810,47	88,48
	SURPLUS/DEFISIT	(8.315.214.288,00)	124.200.384.721,16	(132.515.599.009,16)	(1.493,65)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	240.315.214.288,00	114.914.953.488,17	125.400.260.799,83	47,82
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	18.315.214.288,00	18.314.953.488,17	260.799,83	100,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	18.315.214.288,00	18.314.953.488,17	260.799,83	100,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	222.000.000.000,00	96.600.000.000,00	125.400.000.000,00	43,51
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	222.000.000.000,00	96.600.000.000,00	125.400.000.000,00	43,51
6.1	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	240.315.214.288,00	114.914.953.488,17	125.400.260.799,83	47,82
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	232.000.000.000,00	232.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	232.000.000.000,00	232.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.03.02	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	232.000.000.000,00	232.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	232.000.000.000,00	232.000.000.000,00	0,00	100,00
6	JUMLAH PEMBIAYAAN	472.315.214.288,00	346.914.953.488,17	125.400.260.799,83	73,45
	PEMBIAYAAN NETTO	8.315.214.288,00	(117.085.046.511,83)	125.400.260.799,83	(1.408,08)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	7.115.338.209,33	(7.115.338.209,33)	0,00

BUPATI SAMBAS

ttd

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ERWANTO, SH
NIP. 197805062005021004